

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini, akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan yang menjadi fokus penelitian yaitu melihat Soliditas dan Perpecahan elite Partai Golkar dalam menghadapi suksesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Kota Ternate, yang akan di jabarkan dalam bab ini adalah fenomena Perpecahan dan Soliditas elit Partai Golkar, dalam Pilkada Kota Ternate.

#### **5.I Perpecahan Dan Soliditas Elit Partai Golkar**

##### **5.I.I Perpecahan Elite Partai Golkar Kota Ternate.**

Pertikaian dalam internal partai politik khususnya di Indonesia selalu saja mengara pada dinamika perpecahan para elite, dinamika semacam ini sering kali dilihat dari cara elite partai politik menafasirkan platform dan kebijakan internal atas isu-isu tertentu ini sangat berpengaruh dalam membentuk pragmatisme elite politik yang akan berpotensi merusak soliditas partai politik.

Kekuasaan sering kali dijadikan sebagai tujuan utama elite partai politik, walaupun tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan, di namika ini membuat para elite parpol dan politisi kemudian memanupilasi orientasi utama perjuangan parpol yang seharusnya iyalah berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal berdasarkan platform atau ideology yang dianut, dalam pergeseran orentasi ini dengan sendirinya mengurangi peran ideology dalam membangun militansi dan soliditas partai politik. Berikut hasil wawancara dengan Abdulgani Sangaji Ketua DPD II Golkar Kota Ternate :

“Jadi yang pertama itu perpecahan di tingkat DPP, bahwa khusus kita di Maluku utara golkar tetap solid menghadapi pilkada seretnak 2015, karena semua DPD kab/kota adalah produk hasil munas pekanbaru 2009”.( wawancara tanggal, 15 Februari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa perpecahan yang terjadi dalam tubu partai golkar bermulah di tingkat DPP dan melahirkan dua kubu yaitu kubu Abrizal Bakire dan Agung Laksono, dan golkar Maluku utara menggap bahwa dinamika ini hanya akan terjadi di tingkat pusat tidak berpengaruh ketingat Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di Indonesia.

Perpecahan internal Partai Golkar memakan waktu hampir 1,5 tahun selama perseturan ini terus berlangsung Partai Golkar menjadi tren topic yang selalu saja di wajanakan baik dari kalangan politisi maupun kalangan akademisi, banyak yang beranggapan dinamika perpecahan yang melimpah Partai Golkar adalah bagian dari proses kedewasaan para elite partai untuk jeli sehingga dalam proses penyelesaian harus benar-benar berada pada koridor organisasi partai, berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Korwil pemenang Maluku dan Maluku utara disalah satu media lokal lewat konferensi pers pada tanggal 24 Januari 2015:

“Menurut fredyy Matalata mengingatkan bahwa putusan salah PTUN terdiri dari dua hal yang pertama adalah menundah keabsahan surat hasil munas ancol dan tidak bisa diberlakukan dan kedua ialah kubu angung laksono tidak dibolekan membuat keputusan-keputusan atas nama partai golkar”.(Malut Post tanggal 24 Januari 2015).

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Korwil Maluku dan Maluku Utara adalah bagian dari sebua iktiar politik, tetapi secara tidak langsung perpecahan ditingkat DPP berpengaruh ketingkat daerah sehingga perselisihan elite ditingkat lokal

menuai kontrak atas perpecahan ditingkat pusat, berbagai macam maneuver politik yang dilakukan oleh elite politik Partai Golkar yang ada di kota ternate membuat situasi internal khususnya di Maluku utara makin memanas sehingga melahirkan faksi yang mengatasnamakan mereka adalah bagian dari pengurus pro Angung Laksono berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Freddy Latumahina Korwil Maluku dan Maluku utara:

“Hasil rapat pleno tentang pemberhentian ketua DPD II Kota Ternate Arifin Djafar, Arifin Djafar diberhentikan karena terbukti berhiyanat dan menyebrang ke kubu Angung Laksono dan masih ada sejumlah kader Golkar yang berali dukungan ke kubu Agung Laksono di antaranya Jusman Arifin, Hamid usman, Ikbal Rurai, Jumal Wange, Alwi Ishak, dan Muhlis Tamanyira”. ungkap (Malut Post tanggal 24 Januari 2015).

Pentingannya konsolidasi demokrasi dijadikan sebagai dasar, arah dan tujuan partai politik semua itu sangat jelas di tuangkan dalam UU No 2 tahun 2017 tentang partai politik, dalam pasal 10 UU Partai politik menjelaskan bahwa orientasi partai politik ialah memajukan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasilah serta menjaga mudaya dan etika politik di tanah air, hal ini diperkuat dalam pasal 27 dan 28 AD/ART Malut Post

tanggal 24 Januari 2015).menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pada hakikatnya dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang suda diatur dalam aturan organisasi partai.

Partai Politik sering kali diguyur konflik dalam internal, bukan hanya Golkar menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 terdapat sejumlah partai politik berujung pada pertikaian atau perselisihan pendapat sehingga mengara pada dualisme kepengurusan partai di tingkat pusat, hal semacam ini suda sering kali terjadi dalam partai politik di tanah air, perpecahan Partai Golkar Tahun 2014 banyak pengamat mengemukakan dan melihat perpecahan dalam tubu Partai Golkar, mereka beranggapan bahwa dalam situasi ini disitu kita akan melihat mana kader partai yang militansi dan kader yang hanya mengejar kekuasaan, berikut ini wawancara dengan ketua bidang Komunikasi Partai Golkar Maluku Utara Sahwal Madapoli:

“Saat Arifin Djafar di pecat masih ada lagi kader partai yang berbalik arah dan mengatasnamakan versi agung laksono, pada hal dalam rapat pleno DPD I Golkar Maluku utara tgl 25 april 2015 suda jelas bahwa semua

kab/kota tetap solid dan mendukung ARB, pergeseran ini lebih menambah embrio perpecahan kader partai di Maluku Utara khususnya kota Ternate, jadi kita sudah tau mana kader yang teridology dan kader yang hanya memanfaatkan situasi internal untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis".( wawancara pada tanggal 16 Februari 2018).

Ketika pemecatan ketua DPD II Kota Ternate menuai kontrak antara kader di DPD II Kota Ternate terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh ketua DPD I Golkar Maluku Utara versi Abrizal Bakire sehingga pemecatan ini menambah embrio perpecahan antara elite partai yang ada di Maluku Utara, kajian partai politik tentang perpecahan elite adanya perselisihan dalam memahami ideology dalam teori yang dikemukakan oleh Lewis Fickett ialah perpecahan elite yang terjadi dalam partai politik akan menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang masalah-masalah dasar tidak secara cepat di selesaikan, dalam konteks Indonesia masalah perpecahan partai politik sering menimpa partai politik yang ada di tanah air.

Samsudin haris menjelaskan terdapat tiga hal yang menjadi faktor perpecahan internal partai yang pertama adalah keberadaan

kepeminpinan yang elitis dan eksklusif, adanya distribusi jabatan dalam internal yang tidak berkeadilan dan partai politik dalam konteks pembuat kebijakan terlalu sentralistik sehingga cabang-cabang partai yang ada di daerah tidak memiliki ruang untuk membuat kebijakan yang bersifat independen, dalam pandangan ini partai politik selalu saja membuka ruang perpecahan dalam internal partai ketika suda terjadi perselisihan antara pengurus pusat dan daerah maka akan berdampak pada soliditas partai politik dan berujung pada perpecahan sesama elite, sama hal dengan terjadi di Partai Golkar Kota Ternate sejumlah pengurus DPD II Kota Ternate di pecat oleh DPD I Golkar Maluku Utara, berikut ini wawancara dengan Edi Langkara Sekertaris DPD I Maluku Utara:

“Jadi pemecatan yang kami lakukan ada dasarnya, kalau tidak melanggar intruksi partai berarti kami tidak pecat, tapi ini ada buktinya kalau Bpk Arifin Djafar dan bebera pengurus partai melangkahi intruksi partai, mereka mengkonsolidasikan kader partai untuk mendukung munas ancol jadi itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan pemecatan terhadap mereka” (wawancara tanggal 19 Februari 2018).

Tabel: 5.1 Pemecatan Kader Partai Golkar di Kota Ternate Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	Status Keanggotaan
1	Arifin Djafar	Ketua DPD II Kota Ternate	Dipecat
2	Ikbal Rurai	Anggota DPRD Aktif	Dipecat
3	Jusman Arifin	Ketua Harian Golkar Maluku Utara	Dipecat
4	Jumal Wange	Anggota DPRD Provisi	Dipecat
5	Samsir Andili	Badan Penasehat Golkar Kota Ternate	Dipecat
6	Alwi Ishak	Anggota	Dipecat
7	Muhlis Tamanyira	Anggota	Dipecat

Sumber: Olah Data Penulis (2018).

Dari pemaparan diatas kita melihat bahwa ada tujuh kader partai dan di antaranya dua anggota DPRD aktif juga dipecat, pemecatan ini dilakukan langsung oleh DPD I Golkar Maluku Utara, ketika Ketua DPD II Golkar Kota Ternate dipekat, terdapat sejumlah nama yang ikut diseret dalam pemecatan sebagai anggota Partai Golkar di Maluku Utara, kebijakan yang berujung pada pemecatan, Golkar Maluku Utara khususnya Kota Ternate direspon baik oleh pengurus ditingkat pusat dalam hal versi Abruzal Bakire, DPP menilai bahwa pemecatan sejumlah kader Kota Ternate karena mereka keluar dari arahan dan itruksi partai yang sudah disepakati bersama ditingkat daerah atau DPD I

Maluku Utara, berikut ini kemudian wawancara dengan salah satu kader yang dipecat dan sekaligus anggota DPRD Provinsi Jupal Wange dikediaman kelurahan Jambulah Kec, Pulau Ternate:

“saya kaget dengan kebijakan ini kenapa hak keanggotaan kami di jabut atas dasar apa? Perpecahan kan di DPP kenapa kita di Maluku utara main pecat saja ini kan keliru saya dan teman-teman yang lain juga tidak tau tapi suda ramai di media cetak, alasan kami di pecat karena mendukung Agung Laksono ini kan tidak masuk akal” (wawancara tanggal 20 Februari 2018).

Dalam partai politik memiliki anggota yang mempunyai latar belakan yang berfariasi, perbedaan latar belakan inilah menjadi pemicu dalam memahami ideology, mungkin dari sisi perbedaan ideology yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh partai politik terus saja terjadi, perpecahan dalam internal partai khususnya di Indonesia merupakan konflik dalam perebutan kekuasaan, sering kali perpecahan ini muncul dikarenakan jabatan atau kekuasaan dalam partai menjadi sangat penting bagi mereka sehingga yang menduduki tampuk kekuasaan tersebut, itu sebabnya dalam permainan politik uang atau yang sering disebut

dengan “dagang sapi” telah mengakar dalam internal partai politik dan menular secara masif dalam politik Indonesia.

Anggaran dasar anggaran rumah tangga partai (AD/ART) seharusnya dimaknai sebagai rujukan penyelesaian perselisihan sesama elite yang berkonflik, tetapi aturan-aturan partai masih saja dipertainkan dan diubah hanya untuk kepentingan semata, dalam konteks ini, dinamika dalam partai politik semacam telah bergeser dan lebih mengara pada proses perpecahan ketimbang bagai mana partai politik memikirkan untuk melakukan penyatuan untuk mencapai tujuan partai politik, bahkan dalam situasi ini partai politik telah kehilangan kekuatan atau keseimbangan dalam internal partai politik, hal semacam ini bisa kita lihat perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar.

Di Tahun 2014, perpecahan ini bermula ketika dalam suksesi kekuasaan internal Partai Golkar, ada kelompok-kelompok yang beranggapan bahwa argumentasi mereka tidak diakomodir dengan baik sehingga mereka dianggap dirugikan dan membuat penolakan dan membatalkan dan berujung pada Munas

tandingan antara Munas Bali Vs Munas Ancol, perpecahan ini bukan sajah di tingkat DPP tetapi pengurus di tingkat daerah pun kena imbas sehingga saling mengklaim dan mengatasnaman mereke versi Munas Bali dan Versi Munas Ancol, hal semacam ini terjadi Golkar Maluku Utara terjadinya pemecatan sejumlah kader di Kota Ternate, berikut ini hasil konfrensi pers yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus selaku ketua DPD I Golkar Maluku Utara disalah satu media lokal:

“Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ternate, Arifin Djafar. harus menerima kenyataan dipecat dari Partai Golkar. Dia bukan hanya dipecat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ternate, tetapi juga sebagai anggota Partai Golkar. Pemecatannya itu dituangkan dalam keputusan DPD I Partai Golkar Maluku Utara, nomor 140/DPD/GOLKAR-MU/IV/2014 sementara pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Golkar dilakukan melalui SK DPD I Partai Golkar Malut, nomor : 139/DPD/GOLKAR-MU/2014. Kedua surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Malut, Ahmad Hidayat Mus”. ( Radar Post Tanggal 24 April 2014).

Perpecahan Partai Golkar secara tidak langsung berimbas ke daerah yang ada di tanah air, Maluku Utara adalah salah satu daerah yang harus menerima perpecahan ini, walaupun

konsolidasi internal partai demi menjaga soliditas elite di daerah masih sajah ada celah para elite melakukan maneuver politik yang ujung-ujungnya membahayakan internal partai, Partai Golkar Maluku Utara tidak mampu mejaga soliditas elite sehingga berujung pada faksionalisme dalam tubuh Partai Golkar, kita bisa melihat salah satu pernyataan yang disampaikan langsung oleh ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus disalah satu media lokal apa yang melarbelakangi sehingga kebijakan pemecatan dikeluarkan dalam pentuk surat keputusan (SK), kebijakan ini menandakan bahwa Golkar Maluku Utara secara pelembagaan partai harus terjerumus pada pertikain antara sesama elite partai, berikut ini wawancara dengan Ketua Harian Partai Golkar Maluku Utara Alien Mus:

“Sesuai hasil rapat pleno antara DPD I dan DPD II mencapai kesepakatan bersama dan kami mengakui kepeguruan yang sah itu bpk Abrijal Bakrie dan bpk Idrus Marham, jadi kalau ada kader yang mengatasnamakan kelompok pendukung Agung Laksno, kami akan memberikan sangsi tegas”.(wawancara tanggal 8 Maret 2018).

Golkar Kota Ternate diguyur perpecahan antara elite partai, isu yang berkembang adalah masalah versi ARB dan Agung Laksono, sehingga pendukung ARB memecat sejumlah kader partai tanpa ada pertimbangan dan pemecatan ini telah melahirkan faksi-faksi dalam tubuh Partai Golkar Kota Ternate, sebab terdapat sejumlah kader dan ketua DPD II Kota Ternate ikut juga terseret dalam daftar pemecatan sebagai pengurus Partai Golkar dan hak keanggotan juga digugurkan.

Sejarah konflik dan perpecahan partai politik difase reformasi, maka akan ditemukan beberapa faktor sebagai embrio kemunculan perpecahan dalam internal partai politik. Yang pertama adalah masalah internal partai yang menjadi faktor utama diantaranya adalah ideologi partai, adanya melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair. bukan hanya persoalan internal yang dinilai berpengaruh melahirkan perpecahan internal partai, tetapi masalah eksternal termasuk diantaranya inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim, sehingga

menghasilkan konflik internal dan perpecahan partai politik yang berulang terjadi di Indonesia sejak 1999 lalu sampai hari ini,

Perpecahan Partai Golkar Tahun 2014, pemerintah turut terlibat dalam perpecahan Partai Golkar dalam sebuah wada yang dikenal dengan Mahkamah Partai tempat ini adalah tempat penyelesaian perselisihan pandangan sesama elite partai tetapi keputusan Mahkamah Partai dianggap bukan sebagai tempat penyelesaian masalah sehingga masalah perselisihan ini dibawah kerana Menkumham, langka-langka semacam ini yang menamba embrio perpecahan ini lebih besar, sebab para elite Partai Golkar telah melangkahi aturan main yang sudah diatur dalam internal Partai Golkar, berikut ini kutipan pernyataan yang di sampaikan langsung oleh salah satu penting partai Sahwal Madapoli dimedia lokal:

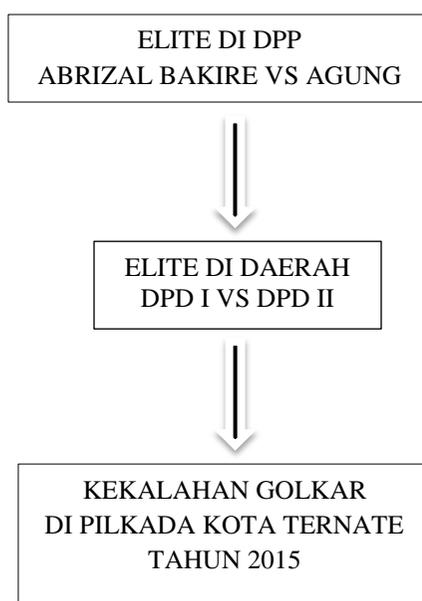
“kader yang militansi itu harus menerima keputusan yang suda di putuskan oleh menkumham dan harus menerima kenyataan ini partai politik dan milik kita semua kalau pertikaian ini terus berlanjut mau dibawa kemana partai ini, belum lagi kita di Maluku Utara kita harus mempersiapkan diri secara internal untuk menhadapi pilkada serentak, bukan kita berlarut-larut

dalam pertikaian ini”. (Malut Post tanggal 25 Maret 2015).

Lemahnya memahami ideologi dan menguatnya pragmatisme ini menjadi alasan terjadinya perpecahan partai politik era reformasi. Sebagai contoh selama era reformasi, terdapat sejumlah masalah internal partai terjadi akibat perpecahan dukungan calon dalam pemilu, terutama pemilihan presiden (pilpres). Hal ini seperti pernah terjadi diinternal Partai Golkar pada Pilpres 2014, perpecahan terjadi akibat anggota partai seringkali mendukung calon presiden/wakil presiden berbeda dengan apa yang ditetapkan partai politik. Hal ini karena dalam memilih capres potensial, baik anggota dan partai, tidak lagi melihat atas dasar kesamaan ideologi, visi dan misi mereka namun lebih pada potensi kemenangan dari sisi popularitas dan sumber daya finansial. Dengan demikian, setiap faksi didalam partai dapat saja memandang berbeda tentang siapa yang layak dicalonkan dalam pemilu, berikut ini wawancara dengan ketua harian Partai Golkar Maluku Utara Alien Mus:

“Perpecahan Partai golkar ketika hasil munas bali secara internal tidak mengusung kader golkar tetapi lebih memilih non kader dalam pilpres 2014, di situlah awal mulahnya terjadi pertikaian sesama elite partai”. ( Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018).

Gambar: 5.1 Skema Konflik dan Perpecahan Elite Partai Golkar



Sumber: Olah Data Penulis (2018).

### 5.I.2 Soliditas Elite Partai Golkar Kota Ternate

Pasca jatunya Presiden Soeharto, terdapat banyak fenomena menarik dalam partai politik salah satunya adalah kegagalan menjaga soliditasnya, sejarah Partai Golkar era reformasi selalau seja diperhadapkan dengan fenomena perpecahan sehingga terdapat beberapa partai politik yang

sekarang ini lagi eksis adalah bagian dari pecahan partai yang berlambang pohon beringin, hal semacam ini menandakan bahwa Partai Golkar tidak mampu menjaga soliditas elite partai, walaupun usia Partai Golkar sudah cukup lama tetapi dalam melembagakan internal partai masih jauh dari harapan, Golkar selalu saja menjadi isu yang sangat menarik dalam kajian perpecahan partai politik di tanah air

Sejumlah kalangan beranggapan bahwa kegagalan Partai Golkar untuk menjaga soliditas dikarenakan internal tidak mengedepankan azas otonom dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai, intervensi pihak eksternal memiliki ruang yang cukup terbuka untuk turut terlibat dalam perpecahan ini, hal semacam ini yang akan membuat Partai Golkar kehilangan arah untuk menjadi solusi dalam hal penyelesaian perselisihan antara elite partai, didalam Partai Golkar terdapat satu wada yaitu Mahkamah Partai, wada ini adalah tempat untuk untuk menyelesaikan berbagai pokok persoalan, tetapi mahkamah partai dianggap bukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan

polemik dalam tubuh Partai Golkar, fenomena semacam ini yang akan melemahkan Partai Golkar untuk menjaga soliditas.

Perpecahan Partai Golkar Tahun 2014 dan melahirkan dualisme kepengurusan berimbas ke struktur pengurus yang ada di daerah, salah satunya adalah DPD I Maluku Utara, kebijakan DPD I yang mengatasnamakan pendukung ARB telah melakukan pemecatan sejumlah kader dan Ketua DPD II Kota Ternate tanpa mempertimbangkan, berikut ini wawancara dengan salah satu kader yang dipecat Alwi Ishak:

“Kebijakan Ketua DPD I atas pemecatan ini bagi saya adalah sebuah keputusan yang keliru, memang keliru polemik di DPP kita Maluku utara main pecat, seharusnya kebijakan dari ketua DPD I menkonsolidasikan agar kita pengurus di Maluku tetap solid, bukan main pecat saja” (wawancara pada tanggal 10 februari 2018).

Dari pemaparan di atas kita melihat bahwa, kebijakan yang dilakukan oleh DPD I yang mengatasnamakan pendukung ARB sangat tidak demokratis, kebijakan ini tanpa mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, di dalam AD/ART Partai Golkar menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan harus melalui forum-forum musawara atau rapat-rapat pleno, sehingga

keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain dan harus bersifat demokratis, setiap partai politik memiliki aturan partai sebagai pijakan untuk menyelesaikan pokok permasalahan dalam internal partai, maka polemik yang terjadi dalam Partai Golkar harus jadikan AD/ART sebagai pedoman penyelesaian masalah berikut ini wawancara dengan anggota partai yang dipecat, Alwi Ishak:

“Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dalam AD/ART, pasal 3 huruf a, bahwa setia anggota partai memperoleh perlakuan yang sama, jangan seenaknya memecat tanpa mempertimbangan aturan-aturan yang di atur dalam partai golkar, kalau ketua DPD I seperti ini maka partai ini akan hancur dan tidak solid ” (wawancara pada tanggal 10 februari 2018).

Partai Golkar Maluku Utara di perhadapkan dengan dinamika perpecahan antara elite menjelang pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, perpecahan ini tidak terlepas dari dinamika politik elite ditingkat pusat yang melahirkan kubuh Abrijal Bakrie dan Agung Laksono atau dalam istilah Munas Bali vs Munas Ancol, dinamika perpecahan ini berlangsung 1,5 tahun menjelang pilkada 2015, akibat dari

perpecahan ini Golkar Maluku Utara kehilangan keseimbangan untuk menjaga soliditas elite dalam menghadapi pilkada serentak khususnya Kota Ternate, kekalahan Partai Golkar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate adalah sebuah kenyataan yang harus diterima oleh Partai Golkar, kebijakan ketua DPD atas pemecatan sejumlah kader Golkar Kota Ternate membuat soliditas elite telah mencair dalam pilkada serentak, kebijakan ini terkesan adalah salah satu faktor utama kekalahan Partai Golkar dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (Sujud-AJA), berikut ini wawancara dengan ketua tim pemenang Muksin Madiani (Sujud-Aja):

“kebijakan ketua DPD I atas pemecatan sejumlah kader Golkar samah seperti mencairkan soliditas elite dalam momentum pilwako ternate, jadi kekalahan pasalon no 1 karena anggota partai koalisi tidak solid, tingkat soliditas telah mencair dan tidak tunduk pada keputusan partai karena kader di pecat dapat melahirkan kelompok dalam tubuh internal” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2018).

Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh ketua tim koalisi bahwa, kader Partai Golkar dalam suksesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, tingkat soliditas secara internal partai tidak terbagun dengan baik, fenomena perpecahan

ini bermula ketika ketua DPD II kota Ternate Arifin Djafar di pecat dan digantikan oleh Hidayat Djafar Sah sebagai plt, menuai pro dan kontra dikalangan elite partai yang ada di Kota Ternate, fenomena ini telah memperlihatkan alite yang mendukung kebijakan ini dan ada pula yang menolak kebijakan atas pemecatan Arifin Djafar sebagai ketua DPD II Kota Ternate, hal semacam ini yang berpengaruh terhadap soliditas elite dalam momentum pilkada 2015 khususnya Kota Ternate, berikut ini wawancara dengan salah satu anggota partai yang dipecat Muhlis Tamanyira:

“kebijakan ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus adalah sebuah keputusan yang tidak mendasar, jangan membuat kegaduhan dalam internal, kalau kami di tuduh keluar dari intruksi partai mana buktinya, kan tidak ada bukti yang membuktikan semua ini, kebijakan ini saya melihat bahwa ada kepentingan politik dalam internal dan ada juga kepentingan eksternal di momentum pilwako 2015”. (wawancara pada tanggal 1 April 2018).

Dari hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa kebijakan ketua DPD I Maluku Utara adalah sebuah keputusan yang kuat kepentingan politik baik internal maupun secara eksternal, sebab Arifin Djafar sebelum dipecat keputusan DPD II

Kota Ternate mengusung Arifin Djafar sebagai calon walikota Ternate, ketika tahapan penjurangan berjalan nama Arifin Djafar kemudian diangkat di bicarakan atas pemecatan yang dilakukan oleh DPD I Maluku Utara, satu-satunya kader yang memiliki potensi untuk di calonkan harus menerima kenyataan ini, di lain pihak kebijakan atas pemecatan ini menurut salah satu kader partai yang di pecat Muhlis Tamanyira, terdapat unsur kepentingan politik di 2015.

“pemecatan terhadap tujuh kader dan ketua DPD II kota ternate adalah sebuah kebijakan yang ada unsur kepentingan politik jangka panjang, kami melihat kebijakan kental dengan kepentingan kelompok dan ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus mau membangun dinasti politik dalam internal, supaya kepentingan politik di pilgub Maluku utara nanti berjalan dengan baik”.(wawancara pada tanggal 1 April 2018).

Konflik dan perpecahan antara DPD I Golkar Maluku Utara dan DPD II Kota Ternate, terdapat unsur kepentingan politik baik internal atau pun eksternal di kepentingan internal adalah ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus belum bisa memberikan posisi ke kader partai yang lain, maka langkah dan maneuver politik Ahmad Hidayat Mus adalah ingin membangun dinasti politik dalam internal Partai Golkar untuk kepentingan

politik Pilgub Maluku Utara Tahun 2018 mendatang, langka dan kebijakan ini adalah bagian dari embrio memunculkan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar Kota Ternate.

## **5.2. Perpecahan Partai Golkar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015**

Tahun 2015 adalah tahun politik yang berlangsung pada bulan Desember mendatang, seluruh partai politik di tanah air turut meramaikan kontestasi dalam hajatan pesta demokrasi, partai politik berloba-lomba melakukan penjaringan dalam pengusungan bakal calon kepala daerah, kerasnya persaingan dalam pencalonan ini membuat tak sedikit partai politik terpecah dan tidak berada dalam satu komando, Partai Golkar di tengatengah perhelatan pilkada serentak 2015, partai yang berlambang pohon bering ini kembali diguyur konflik dan perpecahan elite ditingkat pusat sampai berakhir dengan dulisme kepengurusan, dinamika ini yang pastinya membuat kegaduhan pengurus di tingkat daerah sebab hajatan politik 2015 adalah hajatan pemilihan kepalah daerah, maka sudah pastinya pengurus di tingkat daerah memiliki andil yang cukup besar.

Konsolidasi ditingkat daerah akan terus dilakukan demi menjaga soliditas agar elite partai ditingkat daerah tidak terjerumus dalam perpecahan yang terjadi ditingkat pusat, perpecahan ini secara tidak langsung berimbas diseluru daerah yang ada di tanah air salah satunya adalah DPDI Maluku Utara yang harus menerima kenyataan ini, disamping itu wawancara dengan ketua Harian DPD I Golkar Maluku Utara Alien Mus:

“Ketika Ketua DPD Kota Ternate bapak Arifin Djafar di pecat dan gantikan dengan bapak Hihayat Djafar menui pro dan kontrak dalam internal partai golkar kota ternate, disinilah awal terjadinya perpecahan dalam tubuh partai golkar kota ternate” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2018).

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh ketua harian Partai Golkar Maluku utara, ada titik terang bahwa kebijakan yang dilakukan oleh DPD I atas pemecataan ketua DPD II Kota Ternate menuai pro dan kontrak sehingga kebijakan ini melahirkan konflik dan perpecahan elite yang ada di daerah, pentingnya konsolidasi internal yang masif dalam momentum pilkada serentak, konsuidasi struktur dapat di pahami dalam bentuk penguatan kepengurusan partai baik ditingkat Provinsi

dan kab/kota, bentuk konflik dan perpecahan bisah dapat diselesaikan lewat forum-forum musyawara secara internal partai, maka perlu partai politik melakukan konsolidasi secara internal dan eksternal demi menjaga soliditas elite, berikut ini wawancara dengan ketua bidang komunikasi Sahwal Madapoli:

“Golkar Maluku utara pada awalnya sudah melakukan konsolidasi seuruh kab/kota, karena jangan sampai perpecahan di tingkat DPP kita di Maluku utara juga ikut berkonflik, dan kami suda sepakati bersama dalam rapat pleno, tapi masih ada saja kader-kader yang melanggar keputusan tersebut”. (Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018).

Hungtington 1993, dalam kajian teoritis, sistem politik memiliki andil penting dalam rangka proses konsolidasi demokrasi, Partai Golkar yang kini berkonflik juga sebenarnya sedang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri dan juga sedang diuji apakah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelembagaan konflik. Artinya, pelembagaan konflik yang dimaksudkan adalah partai politik tidak terkecuali Partai Golkar merupakan wadah konflik, peserta konflik, dan bertugas menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, Partai Golkar dalam hal ini seharusnya mampu mengatur dan menyelesaikan

konflik didalam tubuhnya sendiri, baru kemudian bersaing dengan partai lain sebagai peserta konflik dengan *fair*, dan berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Perpecahan Partai Golkar Tahun 2014 membuat partai yang berlambang pohon beringin harus menerima kekalahan dalam kontestasi politik lokal Tahun 2015, Maluku Utara misalnya adalah salah satu Provinsi dan delapan Kab/Kota yang diikuti sertakan dalam Pilkada 2015, Golkar hanya mampu memangkan dua Kabupaten dan kalah di enam kabupaten kota, hal ini mencerminkan bahwa kekalahan Golkar di Maluku utara disebabkan dengan lemahnya konsolidasi structural partai ditingkat Kab/Kota, dengan adanya konflik dan perpecahan dalam internal suara Golkar dalam Pilkada serentak turun secara drastis, di Kota Ternate Golkar tidak mengusung kadernya sendiri tetapi memberi dukungan ke pihak lain tampak mempertimbangkan hasil survey yang dilakukan oleh DPD II Kota Ternate, berikut ini wawancara dengan ketua tim penjaringan bakal calon walikota Ternate Makmur Gamgulu”

“ketika kami membuka penjangaran nama arifin Djafar yaitu ketua DPD II kota ternate telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota, tetapi ketika bpk arifin di pecat kami pun kaget atas dasar apa DPD I mengelurakan kebijakan ini”. (wawancara pada tanggal 25 maret 2018).

Arifin Djafar selaku ketua DPD II Kota Ternate dan menjabat sebagai Wakil Walikota Ternate harus menerima kebijakan atas pemecatan dirinya, pemecatan ini menjadi pembahasan yang cukup hangat dalam internal Partai Golkar Kota Ternate, ada yang beranggapan bahwa kebijakan DPD I Maluku Utara atas pemecatan ketua DPD II Kota Ternate telah melanggar aturan main dalam tubuh Partai Golkar, pada hal sosok Arifin Djafar adalah sosok figure yang akan di usung dalam kontestasi Pilkada Kota Ternate, ketika pemecatan ini berlangsung Partai Golkar yang mengatas namakan pendukung Abrijal Bakrie memberi dukungan ke Partai Gerindra dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan mengusung Sujud Siradjudin sebagai calon Walikota Ternate dan posisi Arifin Djafar yang bukan lagi kader partai telah mendampingi sujud siradjudin dalam momentum ini.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam data KPU terdapat empat pasangan calon, tiga pasangan calon diusung oleh partai politik dan satu lewat jalur independen, untuk melihat kekuatan politik di parlemen Kota Ternate pasangan Burhan Abdullraham dan Abdullah taher memiliki modal politik yang cukup besar ketimbang rival politik yang lain, Partai Golkar Kota Ternate berada pada posisi partai pendukung sebab ketika Arifin Djafar dipecat Golkar kekurangan kader yang potensial untuk diusung sebagai calon Walikota Ternate Tahun 2015, Arifin Djafar yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Walikota aktif berada pada posisi urutan pertama maka bakal calon yang memiliki elektabilitas yang baik, berikut ini wawancara dengan ketua tim penjaringan bakal calon Walikota Makmur Gamgulu menjelaskan bahwa:

“Kebijakan DPD I atas pemecatan ini membuat keretakan dalam tubuh partai golkar kota ternate, pada hal bapak arifin djafar sosok figure yang baik, putra daerah dan satu-satunya perwakilan kesultanan dan kebijakan DPP lebih memilih calon non kader ini lebih menui pro dan kontrak kalau suda terjadi pro dan kontrak maka mesin politik yang bekerja tidak maksimal”. (wawancara pada tanggal 10 Februari 2018).

Perepecahan elite Partai Golkar di daerah tidak terlepas dengan dinamika politik ditingkat pusat, perpecahan ditingkat pusat telah melibatkan seluruh prangkat pengurus ditingkat daerah dalam dinamika perpecahan ini, Maluku Utara adalah salah satu contoh kasus yang kita lihat dimana terjadi pemecatan kader partai yang dilakukan oleh DPD I Maluku Utara yang mengatas namakan pendukung Abrijal Bakire, sehingga memecat sejumlah kader partai yang dianggap membuat perpecahan dalam tubuh Partai Golkar di Maluku Utara.

Kebijakan pemecatan bukan sebagai langkah alternative untuk menjaga soliditas Partai Golkar, tetapi kebijakan justru melahirkan konflik dan perpecahan sesama elite partai, melihat dinamika kebijakan ini mendapat responsive dalam internal partai khususnya di Maluku Utara, atas pemecatan ketua DPD II Kota Ternate telah membuat Partai Golkar kehilangan keseimbangan untuk mengkonsolidasikan kembali dalam menghadapi Pilkada serentak di Kota Ternate, secara internal dengan adanya perpecahan ini Partai Golkar berada pada posisi partai pendukung, tetapi dalam kontestasi politik di Kota Ternate

hasilnya tidak terlalu memuaskan, pada hal dalam sejarah politik Partai Golkar, baik berada pada partai pendukung atau pengusung Partai Golkar kota ternate selalu sajah memenangkan pertarungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, berikut ini wawancara langsung dengan Pak Arifin Djafar:

“Sebelum saya di pecat nama saya juga mendaftarkan diri sebagai calon walikota, dan ketika saya di pecat, pak sujud siradjudin dari gerindra mengajak saya untuk mendampingi beliau sebagai wakil walikota, hal yang paling mendasar sehingga saya di pecat karena di anggap saya melakukan konsolidasi untuk mendukung agung laksono”.(wawancara pada tanggal 25 Maret 2018).

#### 5.2.2 Pemicu Internal

Pasca jatunya pemerintahan otoriter dan beralih ke pemerintahan reformasi partai politik belum mampu menghindari perselisian dalam internal partai, fenomena perpecahan adalah sebuah permasalahan serius yang di hadapi oleh partai politik di tanah air.

Salah satu kasus yang menimpa adalah Partai Golkar, partai yang berkuasaan selama Pemerintahan Orde Baru selalu sajah mengalami perpecahan dan sampai pada bentukan partai baru yang bagian dari pecahan Partai Golkar, masalah pertama

yang selalu sajah menjadi pemicu sehingga lahirnya faksionalias iyala masalah memahami aturan main yang tidak seragam, sehingga ketidak keseragaman ini yang akan memicu terjadinya perselisihan pendapat antara sesama elite partai, perpecahan Partai Golkar di Tahun 2014 secara tidak langsung berimplikasi ke Partai Golkar Maluku Utara, dimana ketua DPD I yang mengatas namakan pendukung ARB memecat sejumlah kader partai Kota Ternate, keputusan telah melahirkan pro dan kontrak dalam internal, berikut ini wawancara dengan salah satu kader partai yang dipecat Alwi Ishak:

“saya menilai pemecatan ini tidak sesuai dengan aturan main partai golkar, kan yang ribut itu DPP kenapa pak ketua Ahmad Hidayat mus yang nonabene mendukung Aburizal Bakire seanaknya melakukan pemecatan tanpa melihat persoalan yang paling mendasar, jadi saya menilai kebijakan ini hanya membuat partai golkar di ternate ini pecah”. (wawancara pada 10 Februari 2018).

Perpecahan Partai Golkar Kota Ternate yang menjadi faktor utama adalah pemicu internal, dimana kebijakan pemecatan ini adalah sumber utama melahirkan konflik dan perpecahan elite partai yang ada di kota ternate, seharusnya yang

namanya institusi baik itu partai politik atau organisasi-organisasi yang pastinya mempunyai mekanisme atau aturan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah dalam internal, dan partai politik untuk menjaga warwa partai agar terhindar dari masalah perpecahan maka AD/ART harus betul-betul dipahami sebagai kiblat atau pedoman dalam penyelesain perselisian antara elite partai.

### 5.2.3 Soliditas Semu

Masalah perpecahan partai politik yang paling mendasar adalah melahirkan partai baru akibat dari polemik yang terjadi dalam internal partai, hal semacam ini menandakan bahwa konflik yang terjadi partai politik tidak mampu menjembatani dan membuka ruang lahirnya faksi, ketika lahirnya faksi maka akan berimplikasi pada membentuk kepengurusan dari tingkat pusat sampai ke daerah, hal semacam ini yang terjadih dalam tubuh Partai Golkar ketika melaksanakan Munas Tahun 2014, Partai Golkar kembalih melahirkan faksi sehingga masing-masing kubu melakukan konsolidasi untuk mengarap dukungan ke pengurus tinkat daerah.

DPD I Maluku Utara mengatas namakan pro Abrizal Bakire memecat sejumlah kader Partai Golkar Kota Ternate, fenomena semacam ini yang akan menciptakan kader yang pragmatis dalam internal karena menggalang dukungan bukan hanya sebatas dukungan melainkan terjadinya dil-dil politik, dengan dukungan ini para kader di iming-iming janji pragmatis atau kompensasinya.

#### 5.2.4 Peran Eksterna

Fenomena perpecahan partai politik semakin kompleks dengan adanya intervensi pihak luar, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu kasus yang terjadi di Partai Golkar, perpecahan Partai Golkar di 2014 turut diwarnai dengan adanya intervensi dari pihak eksternal dalam hal pihak pemerintah. Namun demikian, akar persoalan jelas bukanlah ada pada pihak eksternal, berbagai intervensi itu hanya memainkan peran sekunder saja, dengan tujuan untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik, maka secara otonomisasi Partai Golkar kehilangan kemandirian untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah dalam internal partai, sehingga perpecahan elite Partai

Golkar memakan waktu yang cukup panjang, dengan adanya intervensi pihak pemerintah maka akan lebih menambatkan embrio perpecahan dalam internal partai, dengan adanya intervensi Pemerintah dalam proses penyelesaian berimplikasi pada struktur ditingkat Provinsi, Maluku Utara salah satu daerah yang menerima imbas akibat persetujuan ditingkat pusat, dimana ketua DPD I Maluku Utara yang mengklaim sebagai pendukung Aburizal Bakire memecat sejumlah kader Partai yang ada di Kota Ternate, dengan adanya kebijakan pemecatan terhadap ketua DPD II Kota Ternate dan beberapa pengurus yang lain telah melahirkan faksi dalam internal Partai Golkar Kota Ternate.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang, membuat Partai Politik harus melakukan konsolidasi struktural sampai ditingkat Desa secara massif, persaingan politik dalam momentum Pilkada adalah sebuah persaingan yang cukup ketat dimana partai politik secara internal akan mempersiapkan berbagai strategi untuk keluar sebagai partai pemenang dalam Pilkada serentak Tahun 2015, Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kab/Kota, delapan diantaranya

diikutsertakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik dalam Momentum Pilkada memiliki peran atas kesuksesan demokrasi ditanah air karena partai politik adalah bagian dari pilar demokrasi, harapan publik yang pastinya menginginkan proses demokrasi berjalan dengan aman dan damai dan tidak melahirkan kegaduhan dan perpecahan dikalangan masyarakat.

Masyarakat Kota Ternate memiliki harapan dan memberikan kepercayaan kepada pihak penyelenggara dan Partai Politik untuk mengawal dan mengsucceskan hajatan demokrasi yang berlangsung di Kota Ternate secara aman dan damai, tanggungjawab Partai Politik adalah melakukan penjaringan bakal calon yang memiliki integritas serta kapabilitas yang baik agar aspirasi masyarakat betul-betul diwujudkan dan dilaksanakan.

Tabel: 5.2 Pasangan Calon & Koalisi Partai Politik di Pilkada  
Kota Ternate Tahun 2015

No	Pasangan Calon	Partai Pegusung	Jumlah Kursi	Suara Sah
1	Sujud Siradjudin-Arifin Djafar	Golkar, Gerindra, PAN	10	27.047
2	Burhan Abdurahman-Abdullah Tahir,	PKB, PBB, PPP, Hanura, PKB, PKPI, Demokrat	14	51.594
3	Sidik Dero Siokona-Jasman Abubakar	PDIP, Nasdem, PKS	9	28.841
4	Rachman Sulaiman-Anwar	Independen	-	-

Sumber: KPU Kota Ternate (2015).

Pilkada serentak Tahun 2015 khususnya Kota Ternate terdapat empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Partai Golkar Kota Ternate berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PAN, untuk mengusung pasangan No urut satu yaitu Sujud Siradjudin dan Arifin Djafar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2015-2020, mantan Ketua DPD II Partai Golkar Ternate Arifin Djafar dengan sosok kader yang di pecat dalam Partai Golkar membuat situasi politik dalam internal Partai Golkar lebih menarik untuk di cermati, berikut ini wawancara dengan Ketua tim pemenang Sujud Siradjudin- Arifin Djafar (Sujud-Aja) Muksin Madiani:

“Pak Sujud Siradjudin menentukan pilihan untuk menggandeng Pak Arifin Djafar bagi kami secara internal Gerindra adalah sebuah keputusan yang tepat, karena pak arifin djafar wakil walikota ternate aktif, dan sosok figure yang memiliki pengalam dalam mengelola pemerintahan dan punya basis ril di kota ternate, beliau juga satu-satunya putra terbaik yang berasal dari kesultaan ternate”.( wawancara pada tanggal 3 Maret 2018).

Pasangan calon Sujud-Aja memiliki modal sosial dikalangan masyarakat kota ternate, kehadiran Arifin Djafar sebagai kosong dua mendampingi Sujud Siradjudin dapat dipastikan mampu mengimbangi rival politik yang lain terutama calon petahanan, untuk mensukseskan pertarungan ini dikembalikan kemesin politik yang bekerja secara maksimal, dan konsolidasi internal partai koalisi harus lebih intens sebab sosok Sujud Sirajudin dilihat dari aspek kultural adalah masyarakat pendatang, maka partai koalisi harus betul-betul mengfungsikan struktur Partai sampai di tingkat desa/kelurahan agar pasangan (SUJUD-AJA), dapat memenagkan pertarungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2015-2020, berikut ini wawancara dengan Wahda Imam Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara:

“Terlepas dari partai koalisi, saya pribadi melihat bahwa pasangan (sujud-aja) adalah pasangan yang cukup ideal, sisa bagai mana partai koalisi bekerja dengan baik, yang saya khawatirkan di sini adalah masalah internal partai golkar, harapan saya golkar kota ternate tetap solid dalam momentum ini.”(wawancara pada tanggal 4 April 2018 ).

Partai Koalisi pasangan nomor urut satu (SUJUD-AJA) mengharapkan partai-partai tetap solid, bentuk iktiar politik ini kemudian datang dari Partai Gerindra sebagai Partai pengusung, perpecahan Partai Golkar di Tahun 2014 dan melahirkan dualisme cukup di sayangkan jika konflik ini tidak diselesaikan secara cepat, mengingat bahwa 2015 adalah momentum Pilkada serentak, jangan sampai partai yang berlambang pohon beringin mengalami kekalahan atau penurunan suara di Pilkada serentak, momentum Pemilihan Presiden 2014 masih menyisakan satu bentuk fenomena di mana konflik dan perpecahan terjadi dalam partai politik, Partai Golkar ketika menjelang pemilihan presiden dan paska Pemilihan Presiden Golkar diguyur konflik dan perpecahan, terdapat sejumlah akademisi/pengamat politik melihat bahwa perpecahan ini harus cepat-cepat diselesaikan sebab 2015 adalah pemilihan kepala daerah maka partai-partai politik yang mengalami perselisihan pendapat harus segera

disatukan kembali demi menjaga soliditas internal, sama hal dengan pandangan yang disampaikan oleh salah satu akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Agus Mawanda, dalam pandangannya adalah Partai Golkar harus melakukan islah diantara dua kubu jika dua kubu tidak melakukan konsolidasi untuk islah maka Partai yang berlambang pohon bering ini akan kehilangan basis pemilih dimomentum 2015.

Tabel:5.3 Perolehan Suara Sah Pilkada Serentak Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Periode 2015-2020

No	Nama Pasalon	Partai Koalisi	Perolehan Suara
1	Sujud Siradjudin-Arifin Djafar	Gerindra, Golkar, PAN	21.369 Suara (24,77%)
2	Burhan Aburahman-Abdullah Tahir	PKB,PBB,Hanura,Demokrat, PKPI	34.015 Suara (39,42%)
3	Sidik Dero Siokonadan-Djasman Abubakar	P-DIP, Nasdem, PKS	29.115 Suara (33,74%)
4	Rachman Sulaiman-Anwar	Independen	1.788 Suara (2,07%)

Sumber: KPU Kota Ternate (2015).

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2015-2020, dapat dilihat bahwa, posisi petahan keluar sebagai pemenang, dan pasangan calon yang usung oleh Partai Golkar berada pada posisi ketiga dan PDIP menempatkan posisi

pemenang kedua dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, berikut ini wawancara dengan Ketua Bapillu Partai Golkar Kota Ternate Asgar Asagaf:

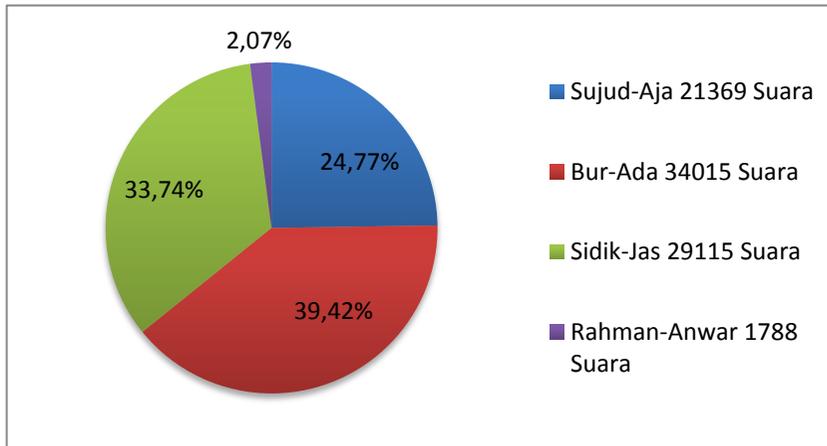
“Delapan kab/kota hanya dua kabupaten yang sukses keluar sebagai pemenang dalam pilkada 2015, kekalahan kami di pemilihan walikota karena Plt ketua DPD II kota ternate tidak mampu mengkonsolidasikan kembali mesin politik agar tetap solid, masalah perpecahan dan konflik bagi saya suda selesai maka elite partai khususnya di ternate harus lebih mengfokuskan dalam kontestasi ini, bukan karena arifin djafar suda bukan lagi kader partai lalu kita tidak bekerja secara maksimal”. (wawancara pada tanggal 17 maret 2018).

Dalam pernyataan diatas menjelaskan bahwa Partai Golkar Kota Ternate, pasca diguyur konflik dan perpecahan antara elite berimbas pada soliditas Partai sehingga suksesi Pilkada serentak 2015 jauh dari harapan, sejarah politik Partai Golkar Kota Ternate, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Walikota Ternate, konflik dan perpecahan elite Partai Golkar Kota Ternate menandakan bahwa Partai yang berlambang pohon beringin ini tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dinamika perbedaan yang terjadi antara elite Partai, situasi semacam ini bisa membahayakan bagi

bangsa dan Negara sebab Partai politik bisa saja menjadi penabur benih konflik, konflik dalam Partai politik selalu saja mengara pada dinamika perpecahan elite dan terjadi faksi dalam internal, hal semacam partai politik khususnya Golkar akan kehilangan basis pemilih daerah tertentu, sebab publik akan merasa gaduk atas dinamika ini dan bisa saja pemilih akan berpindah ke Partai lain, berikut ini wawancara dengan Ketua tim pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Ternate (SUJUD-AJA) dari Partai Gerindra Muksin Madiani:

“perpecahan elite partai golkar kota ternate berimbas ke soliditas partai koalisi, saya melihat ada beberapa kader partai golkar kota ternate yang lebih memilih bekerja dengan kandidat lain ketimbang kandidat yang di usung partai sendiri, misalnya jumal wange dia bekerja dengan pasalon no urut 2, golkar kota ternate tidak solid dalam momentum pilwako ternate”.(wawancara pada tanggal 3 Maret 2018).

Gambar:5.2. Hasil Persolehan Suara Pilkada Kota Ternate Tahun 2015



Sumber: Olah data (2018).

Tabel: 5.4 Daftar Rekasipitulasi Perolehan Suara Pilkada di Kota Ternate Tahun 2015

No	Pasangan Calon	Temate Selatan	Temate Tenga	Temate Utara	Pulau Temate	Moti	Pulau Hini	Batang Dua	Total
1	Sujud-Aja	4.745	3.976	3.579	2.957	4.789	976	347	21.369
2	Bur-Ada	6.415	7.561	6.021	5.350	2.500	4.051	2.117	34.015
3	Sidik-Jas	5.911	4.015	5.000	8.500	3.400	1.500	789	29.115
4	Rahman-Anwar	252	350	320	118	180	286	212	1.788

Sumber: KPU Kota Ternate (2015).

Pasangan calon Walikota (Sujud-Aja) yang usung oleh, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PAN keluar sebagai pemenang ketiga, dari tujuh kecamatan terdapat hanya satu kecamatan yang dimenangkan oleh pasangan Sujud Siradjudin dan Arifin Djafar, di kecamatan Moti dari hasil rekapitulasi suara ditujuh kecamatan

posisi petahan meraup suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode 2015-2020, berikut ini wawancara dengan Ketua Bappilu Partai Golkar Kota Ternate Asgar Asagaf:

“partai Golkar kota ternate, memiliki modal politik yang cukup bagus, kita kemarin dalam pileg 2014 kota ternate kita keluar sebagai partai pemenang suarah terbanyak, dari modal politik ini kami yakin akan memenangkan pilwako di tahun 2015, semua itu jauh dari harapan, saya melihat bahwa kekalahan dalam pilwako di sebabkan tidak ada soliditas yang terbagun dengan baik antara elite partai” (wawancara pada tanggal 17 maret 2018).

Sejarah politik Partai Golkar khususnya Kota Ternate baik Pemilihan Walikota dan Legislatif Partai yang berlambang pohon beringan ini selalu memenangkan pertarungan politik di Kota Ternate, dalam Pemilu Legislatif 2014 Partai Golkar memperoleh suara terbanyak dari partai politik yang lain, ini menandakan bahwa Partai Golkar memiliki modal politik untuk bersaing kembali dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 mendatang.

Dalam momentum Pilkada serentak di Kota Ternate, Partai yang berlambang pohon bering ini telah menorekan sejarah pahit akibat Partai yang berkuasa di Kota Ternate ini dapat ditumbangkan oleh partai-partai politik yang lain, kekalahan dalam Pilkada Kota Ternate menjadiah catatan penting untuk Partai Golkar, dimana Partai Golkar dalam sejarah berpolitikan di Kota Ternate khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak terkalakan dan mereka selalu sukses mengantarkan pasangan calon yang mereka usung, berikut ini wawancara dengan Ketua Bappilu Partai Golkar Kota Ternate Asgar Asagaf:

“kami kalah dalam pilwako ternate karena kader partai tidak solid, sebab ada yang kurang suka dengan sosok arifin djafar dan ada yang pro terhadap arifin djafar, perpecahan ini bermuah ketika waktu itu pak arifn djafar di pecat sebagai ketua DPD II kota ternate, kebijakan ini ada kelompok yang menilai cacat hukum dan menolak atas keputusan ini di lain pihak mendukung ada yang mendukung atas keputusan ini”. (wawancara pada tanggal 17 maret 2018).

Kebijakan ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus atas pemecatan ketua DPD II Kota Ternate berimplikasi pada keretakan

dalam internal Partai Golkar Kota Ternate, pemecatan ini menuai pro dan kontra dimana sebagian kader memosisikan diri untuk melakukan pemebelaaan terhadap Arifin Djafar agar posisi sebagai Ketua DPD II Kota Ternate dipertahankan, fonomena percahan Partai Golkar adalah bagian dari konflik structural antara ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus dan Arifin Djafar selaku ketua DPD II Kota Ternate, konflik ini ada kaitannya dengan polemik yang terjadi di tingkat pusat, sebab pemecatan ketua DPD II Kota Ternate dinilai bahwa Arifin Djafar melakukan konsolidasi disepuluh Kab/Kota yang ada di Maluku utara untuk mendukung Munas Ancol atau versi Agung Laksono.

Ketua DPD I Maluku Utara memecat sejumlah kader yang ada di Kota Ternate, perpecahan dan konflik diantara elite Partai berimplikasi pada kemerosotan suara Partai Golkar Kota Ternate dalam pilkada 2015, dimana Partai Golkar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berkoalisi dengan Partai Gerindra,dan PAN dan gagal memenangkan pertarungan politik di Kota Ternate, kekalahan ini tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon dimana

tingkat soliditas elite Partai Golkar tidak terbagun dengan baik, transisi perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar Kota Ternate sampai pada tahapan Pilkada 2015.